

Internalisasi Pendidikan Khas Kejogjaan dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila untuk Membentuk Karakter Jalma Kang Utama

Khoiriyarningsih^{a, 1*}, Marzuki^{a, 2}, Annisa Istiqomah^{a, 3}

^a Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

¹ khoiriyarningsih.2025@student.uny.ac.id *

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 26 November 2025;

Revised: 8 Desember 2025;

Accepted: 24 Desember 2025.

Kata kata kunci:

Civic disposition;

Jalma Kang Utama;

Pendidikan Karakter;

Pendidikan Khas Kejogjaan;

Pendidikan Pancasila.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pendidikan Khas Kejogjaan (PKJ) sebagai sarana internalisasi nilai-nilai lokal dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila untuk membentuk karakter *Jalma Kang Utama*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang didukung data kuantitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala sekolah/wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru Pendidikan Pancasila, dan 20 murid, penyebaran angket kepada 63 murid, observasi pembelajaran, serta analisis dokumentasi perangkat ajar dan hasil presentasi peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai unggah-ungguh, *andhap asor*, *ngajeni*, gotong royong, tanggung jawab, dan *hamemayu hayuning bawana* terinternalisasi melalui kebijakan sekolah, budaya 5S, dialog budaya, pemanfaatan media digital, diskusi, presentasi, refleksi, dan asesmen sikap. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa PKJ tidak hanya berfungsi sebagai program pelestarian budaya, tetapi juga sebagai strategi pedagogis dalam Pendidikan Pancasila yang mengintegrasikan pendidikan nilai, pendidikan karakter, dan *civic disposition*. Dengan demikian, *Jalma Kang Utama* menjadi representasi lokal warga negara yang santun, bertanggung jawab, dan berkeadaban, serta relevan untuk memperkuat pembentukan karakter peserta didik pada era digital.

ABSTRACT

Internalizing Yogyakarta Distinctive Educational Values in Pancasila Education to Foster the Character of Jalma Kang Utama. This study aims to examine the implementation of Pendidikan Khas Kejogjaan (PKJ) as a means of internalizing local values within Pancasila Education to foster the character of Jalma Kang Utama. The study employed a descriptive qualitative approach supported by quantitative data. Data were collected through interviews with the principal/vice principal for curriculum affairs, Pancasila Education teachers, and 20 students, questionnaires administered to 63 students, classroom observations, and analyses of instructional documents and students' presentation performance. The findings reveal that the values of unggah-ungguh, *andhap asor*, *ngajeni*, mutual cooperation, responsibility, and *hamemayu hayuning bawana* were internalized through school policies, the 5S school culture, cultural dialogue, digital learning media, classroom discussions, presentations, reflective activities, and attitude assessment. The study demonstrates that PKJ functions not merely as a cultural preservation program but as a pedagogical strategy within Pancasila Education that integrates values education, character education, and civic disposition. Consequently, Jalma Kang Utama represents a culturally grounded conception of citizens who are courteous, responsible, and civilized, making it highly relevant for strengthening students' character development in the digital era.

Copyright © 2025 (Khoiriyarningsih, dkk). All Right Reserved

How to Cite : khoiriyarningsih, K., Marzuki, M., & Istiqomah, A. (2025). Internalisasi Pendidikan Khas Kejogjaan dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila untuk Membentuk Karakter Jalma Kang Utama. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(11), 373–385. <https://doi.org/10.56393/decive.v5i11.4509>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pendidikan Pancasila secara normatif memikul mandat pembentukan warga negara yang memahami nilai Pancasila, menghargai konstitusi, hidup dalam keberagaman, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Dalam kajian kewarganegaraan, mandat tersebut tidak cukup dipenuhi melalui penguatan pengetahuan kewargaan, tetapi perlu bergerak pada keterampilan dan watak kewargaan atau *civic disposition* (Banks, 2008; Mulyono, 2017; Parwati et al., 2023). Karena itu, Pendidikan Pancasila perlu dirancang sebagai pengalaman belajar yang membuat murid berlatih menimbang nilai, menguji sikap, dan membiasakan tindakan yang beradab.

Urgensi tersebut menguat karena remaja hidup dalam ekosistem digital yang intens. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melaporkan pengguna internet Indonesia pada 2024 mencapai 221.563.479 jiwa atau 79,5% dari populasi, dengan Generasi Z sebagai salah satu kelompok pengguna terbesar (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024). Data nasional tentang kekerasan anak juga menunjukkan persoalan watak sosial belum selesai; Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 memperkirakan 7,6 juta anak usia 13-17 tahun mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir, sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 2.057 pengaduan pelanggaran hak anak sepanjang 2024 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024; Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2025). Data tersebut tidak dimaksudkan sekadar sebagai latar makro, tetapi sebagai penanda bahwa pembentukan empati, pengendalian diri, penghargaan terhadap orang lain, dan tanggung jawab sosial masih menjadi pekerjaan pendidikan kewargaan.

Ruang digital dapat memperluas akses belajar, kreativitas, dan kolaborasi, tetapi penelitian juga menunjukkan adanya tantangan etis berupa lemahnya verifikasi informasi, ujaran kasar, perundungan siber, dan rendahnya tanggung jawab komunikasi (Dewi, 2024; Hadi et al., 2025; Trisiana et al., 2019). Pada titik ini, persoalan utama Pendidikan Pancasila bukan hanya bagaimana murid memahami norma, melainkan bagaimana nilai tersebut bekerja ketika mereka berhadapan dengan pilihan nyata di kelas, keluarga, masyarakat, dan ruang digital. Pendidikan karakter yang efektif perlu menghubungkan pengetahuan moral, kepekaan afektif, dan tindakan nyata (Berkowitz & Bier, 2004; Faiz & Kurniawaty, 2022; Halawati, 2020).

Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pendidikan Khas Kejojgaan (PKJ) menyediakan sumber lokal yang dapat menjawab kebutuhan tersebut. Buku panduan PKJ menegaskan bahwa pendidikan di DIY diselaraskan dengan kurikulum nasional, tetapi diperkuat oleh nilai lokal untuk membentuk Jalma Kang Utama, yaitu pribadi yang berperilaku utama, berbudi pekerti luhur, dan mampu menghadirkan harmoni dalam kehidupan (Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY & Dewan Pendidikan DIY, 2023). Dengan demikian, PKJ tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian budaya, tetapi juga sebagai variabel lokal yang dapat memperkaya pembentukan *civic disposition* dalam Pendidikan Pancasila.

Nilai PKJ seperti unggah-ungguh, andhap asor, ngajeni, hamemayu hayuning bawana, sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh, dan golong-gilig memiliki relasi langsung dengan watak kewargaan. Unggah-ungguh berkaitan dengan etika komunikasi, andhap asor dengan kerendahan hati dan penerimaan kritik, ngajeni dengan penghormatan terhadap martabat manusia, hamemayu hayuning bawana dengan harmoni sosial dan lingkungan, sedangkan ora mingkuh dengan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut memberi bahasa budaya yang dekat dengan kehidupan murid untuk menjelaskan sikap warga negara yang santun, partisipatif, dan bertanggung jawab (Lahagu et al., 2024; Mulyono, 2017; Parwati et al., 2023).

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa pendidikan karakter lebih kuat ketika nilai diintegrasikan ke dalam kultur sekolah, praktik pembelajaran, dan keteladanan guru. Marzuki (2012) menegaskan bahwa nilai karakter perlu dirancang, dibiasakan, dan diteladankan dalam pembelajaran.

Lestari dan Marzuki (2020) menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat menjadi sarana implementasi karakter ketika terhubung dengan kultur sekolah, sedangkan Marzuki dan Samsuri (2022) menekankan pentingnya sinergi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kajian lain juga memperlihatkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi sumber pembentukan karakter karena nilai yang diajarkan dekat dengan pengalaman murid (Ainia, 2020; Irsan et al., 2024; Kurniawan, 2015; Norianda et al., 2021; Pradina et al., 2021).

Penelitian tentang kearifan lokal dalam pembelajaran kewargaan juga berkembang. Kusnadi (2023) menunjukkan bahwa Batik Pekalongan dapat menjadi sumber pendidikan karakter yang kontekstual. Suryaningsih et al. (2023) menemukan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis kearifan lokal dapat menguatkan civic competence. Ero et al. (2024) menunjukkan bahwa bahan ajar berbasis kearifan lokal Toraja menguatkan literasi budaya dan kewargaan, sedangkan Istianah (2024) menegaskan bahwa kearifan lokal dapat menjadi jalur harmoni dan perdamaian dalam pembelajaran PKn. Namun, kajian-kajian tersebut belum banyak menjelaskan bagaimana nilai lokal bekerja secara operasional melalui perangkat ajar, media digital, observasi perilaku, angket respons, dan asesmen pembelajaran dalam satu alur internalisasi.

Celah penelitian tersebut penting karena kurikulum nasional memang memuat tujuan karakter, tetapi tidak selalu menyediakan bahasa lokal yang cukup dekat dengan pengalaman murid. Pertanyaannya bukan hanya apakah budaya lokal penting, tetapi mengapa nilai Kejojiaan diperlukan dalam Pendidikan Pancasila. Artikel ini menempatkan PKJ sebagai jembatan antara kurikulum nasional dan pengalaman keseharian murid di Yogyakarta, sehingga *civic disposition* tidak hadir sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai kebiasaan menghargai, bertanggung jawab, berkomunikasi santun, bekerja sama, dan menjaga harmoni.

Problem statement penelitian ini adalah belum jelasnya jalur perpindahan nilai PKJ dari level kebijakan sekolah menjadi pengalaman belajar yang membentuk karakter murid. Sekolah telah memiliki simbol, program, dan pembiasaan PKJ, tetapi internalisasi nilai tidak otomatis terjadi hanya karena tercantum dalam dokumen kurikulum. Nilai seperti unggah-ungguh, andhap asor, ngajeni, hamemayu hayuning bawana, greget, sengguh, dan ora mingkuh perlu dibuktikan dalam rancangan pembelajaran, respons murid, penggunaan media digital, observasi sikap, dan asesmen. Karena itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan integrasi PKJ dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila, menganalisis respons murid, serta merumuskan kontribusi PKJ dalam pembentukan karakter Jalma Kang Utama sebagai warga negara yang baik.

Kontribusi artikel ini terletak pada pemetaan PKJ sebagai jembatan antara pendidikan nilai, pendidikan karakter, *civic disposition*, dan praktik Pendidikan Pancasila berbasis data lapangan. Artikel ini tidak menempatkan Jalma Kang Utama sebagai slogan budaya, tetapi sebagai konsep lokal yang dapat direposisi menjadi pilar pembentukan *civic virtue*. Dengan cara itu, Pendidikan Pancasila memperoleh dasar lokalitas yang lebih operasional untuk membentuk warga negara muda yang santun, reflektif, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di SMP Negeri 1 Godean pada pembelajaran Pendidikan Pancasila kelas VIII, terutama materi pelestarian tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Data utama diperoleh melalui wawancara kepala sekolah/waka kurikulum, guru Pendidikan Pancasila, dan 20 murid, sedangkan data pendukung diperoleh dari angket 63 murid, observasi pembelajaran, serta dokumentasi modul ajar, LKPD, media PowerPoint, kisi-kisi asesmen, dan nilai presentasi kelompok. Pengumpulan data dilakukan dengan pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, angket skala empat pilihan, dan telaah dokumen pembelajaran. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan simpulan dengan triangulasi sumber dan teknik, sementara

data angket diolah secara deskriptif menggunakan rerata dan persentase respons setuju-sangat setuju.

Hasil dan Pembahasan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa PKJ di SMP Negeri 1 Godean tidak diletakkan sebagai kegiatan tempelan. PKJ masuk dalam dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan dan perencanaan program sekolah. Pihak sekolah memosisikan PKJ sebagai bagian dari upaya mencetak Jalma Kang Utama. Dalam kegiatan intrakurikuler, PKJ diintegrasikan terutama ke dalam Bahasa Jawa dan Pendidikan Pancasila. Guru diberi ruang untuk menghubungkan nilai PKJ dengan pembiasaan kelas, materi, dan penilaian. Dukungan kebijakan seperti ini penting karena internalisasi nilai tidak akan kuat jika hanya bergantung pada semangat guru secara individual.

Budaya yang paling tampak adalah pembiasaan NGAJENI dan 5S. Budaya ngajeni diwujudkan melalui ngapurancang, jempol sebagai apresiasi, ungkapan nuwun sewu atau nderek langkung ketika lewat di depan orang lain, maturnuwun, monggo, dan inggih. Sekilas praktik ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh inti pendidikan karakter. Murid dilatih memahami bahwa bahasa tubuh dan bahasa lisan membawa pesan penghormatan. Murid juga belajar bahwa relasi sosial yang baik dimulai dari cara menyapa, meminta izin, memberi apresiasi, dan berterima kasih.

Pembiasaan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, memperkuat suasana sekolah sebagai ekosistem karakter. Pendidikan karakter memang tidak cukup dilakukan melalui ceramah tentang kebaikan. Karakter tumbuh ketika murid berulang kali mengalami, melihat, dan mempraktikkan nilai dalam interaksi harian (Berkowitz & Bier, 2004; Marzuki, 2012). Dalam hal ini, budaya sekolah menjadi ruang penting karena murid tidak hanya mempelajari nilai, tetapi mengalami nilai dalam relasi dengan guru, karyawan, dan teman sebaya.

Sekolah juga menguatkan PKJ melalui pemakaian pakaian tradisional Jawa pada Kamis Pon dan hari-hari khusus, sesorah Basa Jawa saat upacara, serta tugas dialog budaya menggunakan bahasa Jawa krama kepada orang tua atau masyarakat sekitar. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa PKJ bergerak pada tiga jalur: simbol budaya, bahasa budaya, dan tindakan budaya. Namun, hasil wawancara sekolah juga menunjukkan satu catatan kritis: tantangan terbesar adalah menjadikan nilai PKJ benar-benar terinternalisasi, bukan sekadar dijalankan karena program. Catatan ini penting karena pendidikan karakter selalu berhadapan dengan risiko formalitas. Nilai perlu masuk ke kesadaran, bukan hanya hadir dalam agenda kegiatan (Marzuki, 2012; Marzuki & Haq, 2018).

Temuan ini sejalan dengan Marzuki dan Samsuri yang menekankan pentingnya strategi tiga pusat pendidikan dalam penguatan karakter (Marzuki & Samsuri, 2022). Sekolah dapat memulai pembiasaan, tetapi keluarga dan masyarakat perlu memberi penguatan. Ketika murid diminta berdialog dengan orang tua tentang tradisi lokal, pembelajaran Pendidikan Pancasila menjadi jembatan antara sekolah dan rumah. Kegiatan tersebut sekaligus menghindarkan PKJ dari pembelajaran yang terlalu jauh dari pengalaman murid. Nilai lokal justru menjadi hidup karena murid menemukannya dalam keluarga dan lingkungannya sendiri.

Dokumen modul ajar menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila yang diteliti berada pada materi pentingnya melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya untuk mengembangkan identitas pribadi, sosial, dan bangsa. Modul ajar menggunakan model Problem Based Learning. Media yang digunakan berupa PowerPoint, YouTube, LCD proyektor, dan LKPD. Dalam kegiatan pendahuluan, guru mengaitkan materi dengan budaya yang masih dilestarikan di lingkungan sekitar murid. Dalam kegiatan inti, murid menyimak video, membaca sumber, berdiskusi kelompok, menulis hasil diskusi, dan mempresentasikan hasilnya. Pola ini menempatkan murid sebagai subjek yang mencari, mendiskusikan, dan mengomunikasikan makna budaya.

LKPD memperlihatkan arah internalisasi nilai yang cukup jelas. Murid tidak hanya diminta menyebutkan contoh budaya. Mereka diminta menemukan berita, artikel, atau video tentang luntarnya

tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Indonesia atau budaya Indonesia yang pernah diklaim oleh negara lain. Setelah itu, murid menuliskan intisari, perasaan setelah membaca atau menyimak, dampak terhadap keberadaan budaya, alasan pelestarian, dan peran pelajar. Pertanyaan tentang perasaan merupakan bagian penting karena pendidikan nilai tidak hanya menyentuh penalaran, tetapi juga kesadaran afektif. Murid diajak masuk ke pertanyaan: mengapa saya perlu peduli?

Media PowerPoint memperkuat konteks lokal. Materi menampilkan contoh tradisi di sekitar Sleman seperti kenduri, sambatan, nyinom, tahlilan, dan mitoni. Media tersebut juga menegaskan bahwa beberapa tradisi mulai memudar karena kehilangan generasi yang mau melestarikannya. Pada bagian aktivitas, kelas dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan hasil wawancara murid dengan orang tua. Setiap kelompok membahas pengertian tradisi, tujuan, ubarampe, prosesi, cara pelestarian, dan peran generasi muda. Kegiatan ini memberi ruang bagi murid untuk memandang budaya sebagai pengetahuan, nilai, dan tanggung jawab.

Kisi-kisi asesmen sumatif juga mendukung arah pembelajaran. Indikator soal tidak hanya mengukur pengenalan istilah, tetapi juga analisis pentingnya pelestarian budaya, pemahaman makna filosofi tradisi, identifikasi faktor penyebab luntarnya budaya, dan pengambilan sikap untuk mempertahankan budaya. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak berhenti pada ingatan, tetapi bergerak ke pemahaman, analisis, dan sikap. Pada level ini, Pendidikan Pancasila berperan sebagai pendidikan nilai yang menghubungkan identitas lokal dengan identitas nasional.

Dari wawancara guru, nilai PKJ yang sering ditekankan meliputi unggah-ungguh, andhap asor, ngajeni, hamemayu hayuning bawana, greget, senggguh, dan ora mingkuh. Unggah-ungguh diarahkan pada tata krama terhadap guru, karyawan, dan teman. Andhap asor diwujudkan melalui kemampuan menerima masukan, tidak mengejek teman, dan tidak merasa paling benar. Ngajeni dikuatkan melalui kebiasaan menghargai guru dan teman. Hamemayu hayuning bawana digunakan untuk menjaga harmoni dalam keberagaman. Greget dan senggguh mendorong murid bersemangat serta percaya diri. Ora mingkuh menguatkan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, menjalankan piket, dan memegang amanah. Nilai-nilai tersebut memperlihatkan bahwa PKJ dekat dengan dimensi moral knowing, moral feeling, dan moral action (Berkowitz & Bier, 2004; Marzuki, 2012).

Pada materi norma, guru mengajak murid menyimulasikan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan unggah-ungguh. Pada materi pelestarian budaya, murid melakukan dialog budaya dengan orang tua atau masyarakat sekitar menggunakan bahasa ibu, terutama bahasa Jawa krama. Dua contoh ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai berlangsung melalui pengalaman. Murid tidak hanya diberi definisi, tetapi diminta mempraktikkan, membandingkan, dan merefleksikan. Dalam pandangan Marzuki, pengintegrasian pendidikan karakter akan lebih kuat apabila nilai masuk dalam kegiatan pembelajaran, bukan hanya ditempelkan pada tujuan (Marzuki, 2012).

Observasi pembelajaran menunjukkan bahwa seluruh aspek yang diamati memperoleh tanda “ya”. Guru membuka kelas dengan suasana santun, mengenalkan nilai PKJ yang relevan, mengaitkan materi Pancasila dengan budaya Yogyakarta, menggunakan media digital, memfasilitasi diskusi nilai, dan memberi umpan balik terhadap sikap murid. Murid terlihat menggunakan bahasa dan sikap yang sopan, menghargai guru dan teman, bekerja sama dalam kelompok, fokus mengikuti pembelajaran, dan bertanggung jawab menyelesaikan tugas. Catatan observasi menegaskan bahwa guru beberapa kali mengingatkan murid untuk menghargai guru maupun teman.

Temuan observasi memperlihatkan bahwa internalisasi nilai PKJ bekerja melalui ritme kecil di kelas. Guru memberi contoh, mengingatkan, mengarahkan diskusi, meminta murid bekerja sama, lalu menutup pembelajaran dengan refleksi. Hal-hal seperti ini sering tidak terlihat spektakuler, tetapi justru menjadi inti pendidikan karakter. Murid belajar bahwa nilai tidak hanya dibicarakan ketika ada materi “karakter”, tetapi muncul dalam cara bertanya, mendengarkan, menanggapi, dan menyelesaikan tugas.

Dalam kerangka Pendidikan Pancasila, observasi ini memperlihatkan adanya hubungan antara nilai lokal dan watak kewargaan. Murid yang belajar ngajeni sedang belajar menghargai martabat orang lain. Murid yang belajar andhap asor sedang belajar menerima perbedaan pendapat. Murid yang berlatih golong-gilig dan gotong royong sedang belajar bekerja untuk kepentingan bersama. Murid yang belajar ora mingkuh sedang berlatih tanggung jawab sebagai warga sekolah. Dengan demikian, PKJ menjadi bahasa budaya untuk menumbuhkan *civic disposition* dalam kehidupan kelas (Banks, 2008; Hoskins & Crick, 2010; Mulyono, 2017).

Angket murid digunakan untuk membaca kecenderungan respons, bukan untuk mengklaim perubahan karakter secara kausal. Setelah pembersihan respons ganda, 63 isian valid menunjukkan rerata 3,59 dari skala 4 dengan dominasi pilihan setuju dan sangat setuju. Temuan ini dibaca sebagai data moral feeling dan persepsi murid terhadap pembelajaran, sedangkan bukti moral action tetap ditopang oleh observasi perilaku kelas, wawancara, dan dokumentasi aktivitas belajar.

Pemaknaan murid terhadap Jalma Kang Utama memperlihatkan bahwa nilai lokal dipahami dalam bentuk perilaku dekat, seperti berbicara sopan, meminta maaf, mengucapkan terima kasih, menghargai pendapat, membantu teman, dan menyelesaikan tugas. Data ini menunjukkan sisi moral knowing dan moral feeling: murid mengetahui istilah nilai dan mulai menghubungkannya dengan pengalaman sosial di sekolah. Namun, pembacaan karakter tidak berhenti pada pengakuan verbal murid, melainkan perlu diuji melalui tindakan yang tampak dalam interaksi kelas.

Pemisahan sumber data menjadi penting agar hasil penelitian tidak terjebak pada pembacaan angka angket semata. LKPD, modul ajar, dan kisi-kisi asesmen terutama menunjukkan moral knowing; wawancara dan angket menunjukkan moral feeling; nilai presentasi terutama menunjukkan civic knowledge dan civic skills; sedangkan moral action dibaca dari observasi sikap, cara murid berdiskusi, menghargai teman, menggunakan bahasa santun, bekerja sama, dan bertanggung jawab terhadap tugas. Alur operasionalisasi tersebut diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Operasionalisasi Bukti Internalisasi Nilai PKJ

Domain Data	Sumber/bukti dan Fungsi Analisis
<i>Moral knowing</i>	Modul ajar, LKPD, kisi-kisi asesmen, dan bahan presentasi menunjukkan pengetahuan murid tentang tradisi, budaya, kearifan lokal, dan keterkaitannya dengan nilai Pancasila.
<i>Moral feeling</i>	Wawancara murid dan angket respons menunjukkan kepedulian, perasaan, dan penerimaan murid terhadap nilai unggah-ungguh, ngajeni, tanggung jawab, dan pelestarian budaya.
<i>Civic knowledge dan civic skills</i>	Nilai presentasi kelompok menunjukkan kemampuan murid menyusun informasi budaya, bekerja sama, berkomunikasi, dan menanggapi pertanyaan secara bertanggung jawab.
<i>Moral action/civic action teramati</i>	Observasi kelas menunjukkan tindakan nyata berupa bahasa santun, menghargai pendapat teman, kerja sama kelompok, fokus belajar, dan tanggung jawab menyelesaikan tugas.
<i>Digital civic literacy</i>	Penggunaan video, artikel, Google Form, Canva, Padlet, dan media kelas digunakan untuk membaca kemampuan murid memilih informasi, merefleksikan isu budaya, dan menyampaikan pesan secara beradab.

Wawancara murid memperlihatkan bahwa sebagian besar murid memaknai Jalma Kang Utama sebagai pribadi yang santun, menghargai orang lain, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Murid menyebut nilai-nilai seperti sopan kepada guru, tidak mengejek teman, menghargai pendapat saat diskusi, membantu teman, mengerjakan tugas, dan menjaga budaya daerah. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa Jalma Kang Utama tidak berhenti sebagai istilah budaya. Bagi murid, istilah tersebut terhubung dengan perilaku yang bisa dilakukan di sekolah.

Jawaban murid juga memperlihatkan adanya hubungan antara nilai lokal dan nasionalisme. Nasionalisme tidak dipahami hanya sebagai upacara bendera atau hafalan simbol negara. Nasionalisme dipahami melalui tindakan sederhana seperti mengenal budaya daerah, menggunakan bahasa yang santun, menghormati tradisi keluarga, tidak malu terhadap budaya sendiri, dan ikut melestarikannya. Di sini Pendidikan Pancasila berperan penting karena mampu menghubungkan budaya lokal dengan identitas nasional. Budaya daerah tidak diposisikan berlawanan dengan kebangsaan, tetapi menjadi jalan untuk memperkaya Indonesia.

Nilai presentasi kelompok digunakan sebagai bukti pendukung *civic knowledge* dan *civic skills*, bukan sebagai ukuran tunggal perubahan karakter. Setelah koreksi data, terdapat 32 kelompok kelas VIII yang dinilai pada tugas presentasi tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Rerata keseluruhan mencapai 94,54 dengan rentang 90 sampai 98. Skor ini menunjukkan kemampuan akademik dan keterampilan kewargaan seperti menyusun informasi budaya, berkomunikasi, menggunakan media, serta bekerja sama; sedangkan tindakan moral nyata tetap dibaca melalui observasi kelas dan wawancara.

Dengan pembacaan tersebut, data presentasi tidak diposisikan sebagai bukti langsung *civic action*, melainkan sebagai jembatan antara pengetahuan budaya dan keterampilan partisipatif. Hubungannya dengan delapan dimensi profil lulusan tampak pada penalaran kritis, komunikasi, kolaborasi, kemandirian, dan kewargaan. Sementara itu, dimensi sikap seperti santun, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap orang lain diperkuat melalui observasi perilaku serta pembiasaan kelas yang berulang.

Tabel 2. Nilai presentasi tradisi, budaya, dan kearifan lokal

Kelas	Jumlah kelompok	Rerata skor	Skor terendah	Skor tertinggi
VIII A	8 kelompok	94,68	93,80	96,20
VIII B	8 kelompok	94,15	91,60	96,40
VIII C	8 kelompok	93,93	90,00	96,40
VIII D	8 kelompok	95,40	93,40	98,00
Total	32 kelompok	94,54	90,00	98,00

Hasil wawancara guru menunjukkan bahwa media digital yang digunakan meliputi Google Classroom, Google Form, Canva, IGO CBT, Padlet, Instagram, YouTube, smart TV atau Google TV, dan laptop. Kehadiran banyak platform ini menunjukkan bahwa guru telah membuka akses belajar berbasis teknologi. Namun, banyaknya perangkat digital tidak otomatis sama dengan meningkatnya partisipasi kewargaan digital, karena digital civic literacy menuntut kemampuan memilih informasi, memeriksa sumber, menyusun argumen etis, dan bertanggung jawab atas pesan yang diproduksi (Hadi et al., 2025; Trisiana et al., 2019).

Temuan angket justru memperlihatkan bahwa butir keaktifan melalui media digital berada pada rerata terendah. Hal ini tidak perlu dibaca sebagai kegagalan teknologi, tetapi sebagai tanda bahwa murid Generasi Z tidak otomatis tertarik pada semua aktivitas digital yang diformalkan sebagai tugas sekolah. Mereka akrab dengan gawai, tetapi kedekatan dengan gawai lebih sering terbentuk melalui pola konsumsi cepat, visual, personal, dan hiburan; ketika media digital dipakai dalam format tugas yang terlalu terstruktur, partisipasi dapat berubah menjadi kepatuhan administratif, bukan keterlibatan reflektif. Dalam konteks Pendidikan Pancasila, literasi kewargaan digital menuntut desain yang mengubah murid dari pengguna media menjadi warga digital yang mampu menilai informasi, berdialog santun, dan memproduksi pesan budaya yang bertanggung jawab (Dewi, 2024; Hoskins & Crick, 2010).

Dengan demikian, tantangan digitalisasi dalam penelitian ini terletak pada kualitas pengalaman belajar, bukan pada ketersediaan aplikasi. Video, berita, artikel, LKPD, dan bahan tayang digital telah membantu murid melihat budaya sebagai isu nyata, tetapi keaktifan akan lebih kuat jika tugas digital

memberi ruang pilihan, kolaborasi terbuka, publikasi karya, umpan balik teman sebaya, dan refleksi nilai. Di titik ini, PKJ dapat menjadi pagar etis bagi digital civic literacy: murid belajar bahwa ruang digital juga membutuhkan unggah-ungguh, ngajeni, tanggung jawab, dan keberanian menyampaikan pendapat secara beradab.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa hubungan PKJ dan Pendidikan Pancasila dapat dibaca melalui tiga lapis. Lapis pertama adalah pendidikan nilai. Pada lapis ini, PKJ menyediakan nilai dasar tentang cara menjadi pribadi yang berbudi, santun, rendah hati, menghargai orang lain, menjaga harmoni, dan bertanggung jawab. Nilai tersebut tidak berdiri sendiri karena dapat dihubungkan dengan Pancasila, terutama nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pendidikan nilai membantu murid memahami mengapa suatu tindakan dianggap baik, bukan sekadar karena diperintah guru (Ainia, 2020; Faiz & Kurniawaty, 2022).

Lapis kedua adalah pendidikan karakter. Nilai PKJ menjadi karakter ketika masuk dalam kebiasaan. Pembiasaan 5S, ngajeni, dialog budaya, kerja kelompok, refleksi, tanggung jawab tugas, dan presentasi budaya merupakan bagian dari proses tersebut. Pendidikan karakter tidak cukup berhenti pada pengetahuan tentang nilai karena karakter yang baik perlu menyentuh pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral (Berkowitz & Bier, 2004; Marzuki, 2012). Dalam penelitian ini, ketiga unsur itu tampak. Murid mengetahui arti unggah-ungguh, merasakan pentingnya melestarikan budaya, lalu mempraktikkannya melalui diskusi, wawancara, presentasi, dan perilaku sopan di kelas.

Lapis ketiga adalah Pendidikan Pancasila sebagai wahana pembentukan warga negara yang baik. Warga negara yang baik tidak hanya dipahami sebagai warga yang patuh, tetapi juga warga yang sadar hak dan kewajiban, menghargai perbedaan, mampu bekerja sama, berkomunikasi secara beradab, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Winataputra menyebut orientasi ini sebagai smart and good citizenship (Mulyono, 2017; Parwati et al., 2023). Dalam konteks penelitian ini, Jalma Kang Utama menjadi jembatan lokal menuju karakter warga negara yang baik. Murid yang santun, ngajeni, andhap asor, gotong royong, dan ora mingkuh sedang membangun watak kewargaan dalam bentuk yang dekat dengan kultur Yogyakarta.

Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari indikator perilaku. Unggah-ungguh berhubungan dengan komunikasi demokratis karena murid belajar menyampaikan pendapat secara santun. Andhap asor berhubungan dengan keterbukaan terhadap pendapat orang lain. Ngajeni berhubungan dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Gotong royong atau golong-gilig berhubungan dengan kolaborasi dan kepentingan bersama. Ora mingkuh berhubungan dengan tanggung jawab. Hamemayu hayuning bawana berhubungan dengan kepedulian sosial dan lingkungan. Dengan cara ini, PKJ bukan hanya budaya lokal, tetapi juga sumber pembentukan civic virtue.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa internalisasi nilai lebih kuat ketika pembelajaran melibatkan keluarga dan masyarakat. Tugas dialog budaya dengan orang tua membuat murid menyadari bahwa nilai tidak hanya berada di buku. Nilai hidup dalam cerita keluarga, praktik kenduri, mitoni, nyinom, tahlilan, nyadran, tedhak siten, sambatan, dan berbagai tradisi lain. Melalui dialog ini, murid belajar bahwa budaya memiliki makna sosial. Tradisi tidak hanya dipandang sebagai acara, tetapi sebagai cara masyarakat membangun syukur, gotong royong, solidaritas, hormat kepada leluhur, dan harmoni. Ini sejalan dengan pandangan bahwa kearifan lokal dapat menjadi pembentuk karakter masyarakat (Mazid et al., 2020).

Dengan demikian, model internalisasi yang muncul dari penelitian ini dapat diringkas menjadi lima tahap. Pertama, sekolah menyediakan kebijakan dan budaya pembiasaan. Kedua, guru mengaitkan materi Pendidikan Pancasila dengan nilai PKJ. Ketiga, murid mengalami nilai melalui diskusi, dialog budaya, kerja kelompok, dan presentasi. Keempat, guru memberi refleksi serta asesmen sikap. Kelima, nilai diperkuat dalam keluarga, budaya sekolah, dan ruang digital. Model ini tidak bersifat final, tetapi

dapat menjadi rancangan praktis bagi guru Pendidikan Pancasila yang ingin mengintegrasikan kearifan lokal secara lebih bermakna.

Tabel 3. Sintesis nilai PKJ dan karakter warga negara yang baik

Nilai PKJ	Makna karakter	Relevansi dengan Pendidikan Pancasila
Unggah-ungguh	Kesantunan, kepatutan, dan berakhlak	Melatih komunikasi warga negara yang beradab dan menghargai orang lain.
Andhap asor	Rendah hati, terbuka terhadap masukan	Mendukung sikap demokratis dan kemampuan menerima perbedaan pendapat.
Ngajeni	Menghormati guru, teman, orang tua, dan sesama	Menguatkan penghormatan terhadap martabat manusia dan nilai kemanusiaan.
Golong-gilig/gotong royong	Kebersamaan dan kerja untuk tujuan bersama	Selaras dengan persatuan, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial.
Ora mingkuh	Tidak lari dari tanggung jawab	Membentuk warga negara yang sadar kewajiban dan berani mempertanggungjawabkan tindakan.
Hamemayu hayuning bawana	Menjaga harmoni sosial dan lingkungan	Menguatkan kepedulian terhadap kehidupan bersama dan keadaban publik.

Secara konseptual, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Jalma Kang Utama dapat dibaca sebagai formulasi lokal dari warga negara yang baik. Warga negara yang baik dalam Pendidikan Pancasila adalah murid yang beriman, berakhlak, menghargai martabat orang lain, bertanggung jawab, sadar keberagaman, mampu berkolaborasi, berpikir kritis, dan berkomunikasi dengan santun. Karakter tersebut sejalan dengan delapan dimensi profil lulusan, terutama keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, dan komunikasi. Dengan demikian, PKJ tidak berdiri di luar kurikulum nasional, tetapi justru dapat menjadi jalan lokal untuk menghidupkan tujuan pendidikan nasional dalam praktik yang lebih dekat dengan kehidupan murid.

Temuan penelitian ini memberi beberapa implikasi praktis bagi guru Pendidikan Pancasila. Pertama, nilai PKJ perlu dihadirkan secara eksplisit sebagai nilai kewargaan, bukan hanya sebagai ornamen budaya lokal. Ketika guru membahas unggah-ungguh, nilai tersebut dapat dikaitkan dengan etika komunikasi demokratis. Ketika guru membahas andhap asor, nilai itu dapat diarahkan pada kemampuan menerima kritik, tidak merasa paling benar, dan menghormati pendapat orang lain. Ketika guru membahas hamemayu hayuning bawana, pembelajaran dapat diperluas pada tanggung jawab sosial, kepedulian lingkungan, dan harmoni dalam keberagaman. Dengan pola ini, murid tidak hanya mengenal istilah lokal, tetapi memahami relevansinya bagi kehidupan sebagai warga negara.

Kedua, integrasi PKJ dalam Pendidikan Pancasila sebaiknya tidak berhenti pada materi Bhinneka Tunggal Ika. Materi norma dapat dihubungkan dengan unggah-ungguh, sopan santun, dan budaya ngajeni. Materi hak dan kewajiban dapat dikaitkan dengan ora mingkuh sebagai sikap bertanggung jawab terhadap tugas dan amanah. Materi musyawarah dapat dikaitkan dengan andhap asor, golong-gilig, dan kemampuan mendengarkan pendapat orang lain. Materi identitas nasional dapat diperkaya dengan tradisi, bahasa, pakaian adat, serta praktik budaya lokal yang hidup di sekitar murid. Pola ini membuat PKJ menjadi pendekatan lintas materi, bukan hanya sisipan pada satu pokok bahasan.

Ketiga, media digital perlu direposisi sebagai ruang literasi kewargaan digital, bukan sekadar alat pengumpulan tugas. Rendahnya rerata keaktifan digital menunjukkan bahwa murid tidak cukup diberi akses pada video, kuis, Google Form, Padlet, atau Canva; mereka perlu diberi peran sebagai penelusur informasi, penyaring sumber, penyusun narasi budaya, dan produsen pesan publik yang santun. Pembelajaran PKJ berbasis digital dapat dibuat lebih kuat melalui proyek video pendek, peta budaya digital, kampanye pelestarian budaya di media sosial sekolah, dan refleksi etika komunikasi. Dengan

pola tersebut, digitalisasi tidak berhenti sebagai kemasan pembelajaran, tetapi menjadi ruang latihan *civic virtue* di dunia maya.

Keempat, asesmen karakter perlu dibuat lebih tampak. Selama ini guru sudah menggunakan observasi dan penilaian sikap. Namun, agar praktik pembelajaran lebih kuat, guru dapat mengembangkan rubrik sederhana yang menilai indikator unggah-ungguh, ngajeni, gotong royong, tanggung jawab, keberanian berpendapat, dan kemampuan merefleksikan nilai. Rubrik tersebut tidak perlu rumit, tetapi harus memberi gambaran perilaku yang jelas. Misalnya, indikator ngajeni dapat dilihat dari kemampuan murid mendengarkan teman tanpa menyela, memberi apresiasi, tidak mengejek, dan menggunakan bahasa yang pantas saat berdiskusi.

Kelima, sekolah perlu menjaga kesinambungan antara pembelajaran, budaya sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tugas dialog budaya dengan orang tua menjadi contoh yang kuat karena murid belajar bahwa tradisi bukan hanya materi kelas, melainkan praktik hidup yang diwariskan dalam keluarga. Ketika murid mewawancarai orang tua tentang kenduri, nyinom, tahlilan, mitoni, wiwitan, atau tradisi lain, mereka sedang membangun memori budaya sekaligus belajar menghargai pengalaman generasi sebelumnya. Hal ini penting karena karakter Jalma Kang Utama tidak mungkin terbentuk hanya melalui satu kali pertemuan, melainkan melalui proses yang berulang dan didukung ekosistem.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi dan desain. Data diambil pada satu sekolah dan satu konteks pembelajaran, sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan untuk semua sekolah di Yogyakarta. Selain itu, angket yang digunakan bersifat deskriptif sehingga belum dapat menunjukkan hubungan sebab-akibat antara pembelajaran berbasis PKJ dan perubahan karakter murid. Meski demikian, kekuatan penelitian ini terletak pada triangulasi data melalui wawancara, angket, observasi, dokumentasi perangkat ajar, dan nilai presentasi murid. Penelitian berikutnya dapat memperluas lokasi, membandingkan sekolah dengan model implementasi PKJ yang berbeda, atau menguji pengaruh pembelajaran berbasis PKJ terhadap dimensi karakter tertentu secara kuantitatif.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa Pendidikan Khas Kejojiaan dapat direposisi dari program budaya sekolah menjadi strategi pedagogis Pendidikan Pancasila untuk membentuk *civic virtue*. Jalma Kang Utama tidak hanya dimaknai sebagai identitas lokal Yogyakarta, tetapi sebagai formulasi kewargaan yang memadukan kesantunan, kerendahan hati, penghargaan terhadap sesama, tanggung jawab, gotong royong, dan kepedulian terhadap harmoni sosial. Internalisasi nilai tersebut berlangsung ketika kebijakan sekolah, budaya pembiasaan, perangkat ajar, dialog budaya, media digital, observasi sikap, dan asesmen pembelajaran bergerak dalam satu alur yang saling menguatkan. Secara teoretis, temuan ini memperlihatkan bahwa PKJ dapat menjadi jembatan antara pendidikan nilai, pendidikan karakter, dan *civic disposition* dalam Pendidikan Pancasila. Secara praktis, guru perlu memastikan bahwa nilai lokal tidak berhenti sebagai simbol atau kegiatan seremonial, tetapi diolah menjadi pengalaman belajar yang mendorong murid memahami nilai, merasakan urgensinya, dan mempraktikkannya dalam komunikasi, kerja sama, tanggung jawab, serta partisipasi digital yang beradab.

Referensi

- Ainia, D. K. (2020). Merdeka belajar dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara dan relevansinya bagi pengembangan pendidikan karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 95–101. <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i3.24525>
- Anugrah, A., & Rahmat, R. (2024). Pendidikan karakter dalam perspektif kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*, 4(1), 22–34. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i1.403>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, February 7). *APJII jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang*. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>

- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2025). *Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 046/H/KR/2025 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah*.
- Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher*, 37(3), 129–139. <https://doi.org/10.3102/0013189X08317501>
- Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2004). Research-based character education. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 591(1), 72–85. <https://doi.org/10.1177/0002716203260082>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Dewi, N. N. (2024). Pentingnya menjaga nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat bagi generasi Z. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2). <https://doi.org/10.56393/decive.v4i2.2071>
- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, & Dewan Pendidikan DIY. (2023). *Buku panduan Pendidikan Khas Kejojiaan pendidikan menengah*.
- Diwanti, A. (2025). Pendidikan Khas Kejojiaan dalam pembentukan karakter siswa. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/pedagogik/article/view/11149>
- Ero, P. E. L., Bandong, I., Ali, M., & Mustadi, A. (2024). Penguatan literasi budaya dan kewargaan melalui bahan ajar berbasis kearifan lokal Toraja. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(1), 12–20. <https://doi.org/10.24269/jpk.v9i1.8278>
- Faishal, M. R. (2024). Urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam membangun partisipasi politik untuk mewujudkan masyarakat madani. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(9), 318–324. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i9.2467>
- Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2022). Urgensi pendidikan nilai di era globalisasi. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 3222–3229. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2581>
- Hadi, M., Marzuki, M., & Alfiansyah, M. D. (2025). Internalisasi etika demokrasi digital berbasis kearifan lokal Bima dalam penguatan nasionalisme dan persatuan siswa madrasah. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(5), 216–226. <https://doi.org/10.56393/decive.v5i5.4306>
- Halawati, F. (2020). Pengaruh pendidikan karakter terhadap perilaku siswa. *Education and Human Development Journal*, 5(2), 51–60. <https://doi.org/10.33086/ehdj.v5i2.1561>
- Hoskins, B., & Crick, R. D. (2010). Competences for learning to learn and active citizenship: Different currencies or two sides of the same coin? *European Journal of Education*, 45(1), 121–137. <https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2009.01419.x>
- Irsan, I., Nurmaya G, A. L., Nurlaila, M., Syamsurijal, S., & Agus, A. A. A. (2024). Kearifan lokal sebagai pilar utama dalam pembentukan karakter siswa: Eksplorasi dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 1814–1825. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i2.6392>
- Ismail, S., Suhana, S., & Zakiah, Q. Y. (2021). Analisis kebijakan penguatan pendidikan karakter dalam mewujudkan Pelajar Pancasila di sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1), 76–84. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.388>
- Istianah, A. (2024). Pendidikan kearifan lokal dalam pembelajaran PKn sebagai wujud harmoni perdamaian. *Pelita: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 24(1), 57–67. <https://doi.org/10.33592/pelita.v24i1.4873>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024, October 7). *Kemen PPPA ungkap kekerasan terhadap perempuan dan anak turun signifikan di 2024*. InfoPublik. <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/875954/kemen-ppa-ungkap-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-turun-signifikan-di-2024>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/321419/permendikdasmen-no-10-tahun-2025>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025, February 11). *Laporan tahunan KPAI: Jalan terjal perlindungan anak: Ancaman serius generasi emas Indonesia*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman->

serius-generasi-emas-indonesia

- Kurniawan, M. I. (2015). Tri pusat pendidikan sebagai sarana pendidikan karakter anak sekolah dasar. *Pedagogia: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 41–49. <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v4i1.71>
- Kusnadi, K. (2023). Exploring character education through batik Pekalongan local wisdom: An innovative approach to character learning. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 223–235. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.57000>
- Lahagu, A. S. H., Harefa, A., Lase, F., & Lase, B. P. (2024). Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan civic disposition bagi peserta didik. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 4(4), 108–123. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i4.7513>
- Lestari, Y. N., & Marzuki. (2020). Implementasi pendidikan karakter melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah berbasis pesantren. *Humanika*, 20(1), 45–62. <https://doi.org/10.21831/hum.v20i1.27575>
- Marzuki. (2012). Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran di sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(1). <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.1450>
- Marzuki, & Haq, P. I. (2018). Penanaman nilai-nilai karakter religius dan karakter kebangsaan di Madrasah Tsanawiyah Al Falah Jatinangor Sumedang. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(1), 84–94. <https://doi.org/10.21831/jpk.v8i1.21677>
- Marzuki, & Samsuri. (2022). The strategy of three education centers for strengthening character education in Indonesia in the era of Industrial Revolution 4.0. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 119–133. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.40325>
- Mazid, S., Prasetyo, D., & Farikah, F. (2020). Nilai-nilai kearifan lokal sebagai pembentuk karakter masyarakat. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 249–262. <https://doi.org/10.21831/jpk.v10i2.34099>
- Mulyono, B. (2017). Reorientasi civic disposition dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 218–225. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.17007>
- Norianda, N., Dewantara, J. A., & Sulistyarini, S. (2021). Internalisasi nilai dan karakter melalui budaya sekolah: Studi budaya sekolah Jumat Berkah. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 5(1), 45–57. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2021.005.01.4>
- Nurbaya, S., & Marzuki. (2024). Nilai pendidikan karakter dalam proses asah asih asuh anak majikan studi kasus pekerja migran di Hongkong. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(1), 104–113. <https://doi.org/10.21831/jpka.v14i1.59697>
- Nuryadi, M. H., Widiatmaka, P., & Hakim, M. L. (2024). Peran guru PPKn dalam menjaga eksistensi nilai-nilai kearifan lokal sebagai kepribadian bangsa di era digital. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 8(1), 109–122. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2024.008.01.8>
- Parwati, Y., Saylendra, N. P., & Nugraha, Y. (2023). Efektivitas pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan civic disposition siswa pada Kurikulum Merdeka. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(9), 310–316. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i9.1782>
- Pradina, Q., Faiz, A., & Yuningsih, D. (2021). Peran guru dalam membentuk karakter disiplin. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 4118–4125. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1294>
- Print, M. (2007). Citizenship education and youth participation in democracy. *British Journal of Educational Studies*, 55(3), 325–345. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2007.00382.x>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suryaningsih, A., Winarno, W., Hed, N. M., & Widiatmaka, P. (2023). Exploring citizenship competencies in Pancasila subjects through local wisdom in the Merdeka curriculum. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 236–249. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.61550>
- Trisiana, A., Sugiaryo, S., & Rispantyo, R. (2019). Model desain Pendidikan Kewarganegaraan di era media digital sebagai pendukung implementasi pendidikan karakter. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(2), 154–164. <https://doi.org/10.21831/jc.v16i2.24743>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. *American Educational Research Journal*, 41(2), 237–269.
<https://doi.org/10.3102/00028312041002237>